

## HITAM PUTIH PRRI-PERMESTA: *KONVERGENSI* DUA KEPENTINGAN BERBEDA 1956–1961

Faishal Hilmy Maulida

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, hilmyfm92@gmail.com

DOI: 10.17510/paradigma.v8i2.180

### ABSTRACT

Regional upheavals that occurred in Sumatra and Sulawesi in the period of 1956–1961 indicated a meeting point between two interests, i.e. the desire of the regions to get rights through regional autonomy and develop power to eradicate communism. This paper aimed at analysing regional upheavals involving PRRI-Permesta in terms of the meeting point between the two different interests. The method used in this study is a historical one. The results showed that the upheavals that arose from certain interests could not be accommodated by the central government, and this made the region take the initiative to solve them with military engagement. It can be concluded that PRRI-Permesta was an emerging movement in the region demanding reforms in the management of the state by the central government. The anti-communist characteristics of the movement made the United States of America ready to provide support for a movement against the central government. However, this also means that there was an encounter between two different interests in one vision of the struggle.

### KEYWORDS

Regional Upheaval; PRRI-Permesta; Sumatra and Sulawesi.

### Pendahuluan

Membahas pergolakan daerah yang muncul pada masa demokrasi liberal dari tahun 1950-an hingga berakhir pada awal masa demokrasi terpimpin yang melibatkan PRRI-Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia-Perjuangan Semesta) tentu saja tidak dapat disimpulkan berdasarkan periode pergolakan di Sumatra dan Sulawesi. Konstelasi politis dalam negeri masih belum benar-benar stabil, meskipun pemilu pertama berhasil dilaksanakan pada 1955. Usai pelaksanaan pemilu justru semakin tampak polarisasi, baik antarpartai, antarideologi, hingga antarkelompok kepentingan. Dalam konstelasi politis, polarisasi dianggap sebagai hal yang lumrah, tetapi mulai membahayakan ketika memunculkan kesenjangan. Isu pemerataan ekonomi muncul sebagai sekat pemisah antara daerah dan pusat (Jakarta) atau antara Jawa dan luar Jawa, terlebih kesenjangan itu terpola berdasarkan hasil pemilu.

Polarisasi tersebut berasal dari hasil Pemilu (Pemilihan Umum) 1955. Di satu pihak PNI (Partai Nasional Indonesia) mendapat dukungan terkuat di Pulau Jawa, demikian pula NU (Nahdlatul Ulama). Di pihak lain, partai agama, seperti Partai Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia), Partai Katolik, Parkindo (Partai

Kristen Indonesia), PSII (Partai Syarekat Islam Indonesia), lebih banyak mewakili luar Jawa. Sementara itu PKI (Partai Komunis Indonesia) membentuk kantong-kantong suara PNI di Pulau Jawa (Leirissa 1997, 8). Keberadaan wakil politis di parlemen berkaitan erat dengan hasil yang didapatkan partai politik di Pemilu 1955. Adanya persebaran wakil politis yang didasarkan pada jumlah penduduk membuat Jawa mendominasi wakil politis di parlemen. Tiga dari empat partai (PNI, Masjumi, NU, dan PKI) yang diklasifikasikan oleh Herbert Feith sebagai partai besar mendominasi suara di Pulau Jawa. PNI memperoleh 85,7 persen suara untuk parlemen dari Jawa, NU 85,6 persen, sementara PKI 88,6 persen. Jawa merupakan sebagian kecil dari cakupan wilayah pemilu, tetapi memiliki penduduk mayoritas dengan 66,2 persen dari penduduk Indonesia. Berdasarkan statistik PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) per 30 Oktober 1954, penduduk Jawa berjumlah 51.637.552 orang, sementara jumlah penduduk Indonesia 77.987.879 orang (Feith 1999).

Sementara itu, Masjumi, sebagai salah satu partai yang masuk dalam kelompok empat besar pemilu, mendominasi persebaran suara di luar Jawa. Polarisasi hasil pemilu di Jawa dan luar Jawa juga menunjukkan kecenderungan polarisasi antara Partai Nasionalis dan Komunis di Jawa dan Partai Agama di Luar Jawa. Polarisasi itu pada masa berikutnya memunculkan pergolakan di luar Jawa (Sumatra dan Sulawesi). Persoalan polarisasi politis yang turut memperkeruh suasana pembangunan nasional, semakin tidak kondusif akibat kegagalan pemerintah dalam mengurus perekonomian. Sentralisasi perekonomian nasional menyebabkan daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi berpenduduk sedikit, tidak dapat menikmati hasil alamnya, sebagaimana daerah luar Jawa terutama di Sumatra dan Sulawesi.

Pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953–1954) berjalan hanya sebatas slogan karena kabinet sangat tidak akomodatif terhadap modal asing, kabinet menganggap modal asing sangat merugikan Indonesia. Keadaan diperparah dengan kebijakan “*dropping pegawai*” dari pusat ke daerah, sebagai dalih menggagalkan persatuan. Menurut Kahin, pada dasarnya ada semacam *spoil system* yang membuka peluang bagi orang tertentu untuk meraih keuntungan materiil serta jabatan di pusat ataupun di daerah. Akibatnya, tampak bahwa PNI sendiri yang diperkuat, bukan bangsa secara umum (Kahin 1959, 559–572). Sistem *dropping pegawai* memberi dampak pada peran putra daerah yang terancam oleh kebijakan itu.

Kegagalan pembangunan ekonomi tersebut sangat dirasakan oleh berbagai lapisan dan golongan dalam masyarakat. Salah satu golongan yang mengalami kesulitan adalah para prajurit. Tindakan pemerintah menambah masalah ekonomi, seperti penyalahgunaan devisa, pemberian izin istimewa kepada anggota partai penyokongnya, serta birokrasi perizinan yang sangat berbelit-belit itu, menghambat pedagang. Pimpinan pasukan di berbagai wilayah pun kesal karena alokasi keuangan bagi operasi militer serta kesejahteraan prajurit tidak terlaksana dengan semestinya. Maka, mereka mencari cara sendiri dalam menghimpun dana. Cara yang ditempuh antara lain mengeksport sendiri hasil pertanian lokal tanpa prosedur administratif di Jakarta. Pemerintah di Jakarta menamakan kegiatan para panglima itu “barter” (Sundhaussen 1986, 102). Salah satu contoh adalah Sumatra Utara, Sulawesi Utara, dan Selatan. Kegiatan barter dilakukan oleh para panglima di wilayah lain seperti di Jawa Barat melalui pelabuhan Cirebon, Jawa Tengah, dan Maluku, bahkan Jakarta (Leirissa 1997, 13).

Selain berbagai persoalan di atas, kedekatan PKI dengan Soekarno memunculkan ancaman bagi sebagian militer, terutama Angkatan Darat. Terlebih kebangkitan PKI pasca-Pemberontakan Madiun 1948 tampak nyata pada hasil pemilu: PKI menduduki posisi empat besar, berada di bawah PNI, Masjumi, dan NU. Sikap Soekarno yang semakin sejalan dengan pandangan PKI untuk menanggulangi masalah politik dan ekonomi, membuatnya berbeda pandangan dengan Hatta. Akibatnya, Hatta meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden sejak 1 Desember 1956. Permasalahan Dwitunggal (Soekarno-Hatta) di kemudian hari menjadi salah satu sebab kekacauan politis di Indonesia. Maka, untuk membedah masalah ini, yang

menjadi perhatian adalah (a) Pembangunan Ekonomi dan Semangat Desentralisasi, (b) Komunisme sebagai Sebuah Ancaman, (c) Perjumpaan antara Dua Kepentingan Berbeda.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah (*historical method*) digunakan karena data yang digali berupa perkembangan masa lampau. Dalam metode penelitian sejarah, terdapat berbagai kemungkinan yang membuat sejarawan harus mampu menemukan data yang bebas dari prasangka (*without prejudice*), fakta harus jelas dan berbeda dari opini, bukti harus dapat diterima dari saksi-saksi yang tidak berpihak, harus melalui proses analitis-kritis dan dapat dijaga objektivitasnya (Southgate 1996, 12). Maka diperlukan metode yang tepat untuk memecahkan sebuah persoalan historis. Tahapan yang harus ditempuh melalui metode sejarah, antara lain (1) pemilihan topik, (2) heuristik (pengumpulan sumber), terutama sumber primer berupa arsip yang didapatkan penulis dari ANRI, Jalan Ampera, Cilandak, Jakarta Selatan, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi (analisis dan sintesis), dan (5) historiografi (penulisan) (Kuntowijoyo 2001, 91).

Penelitian historis diberi batasan tematis, spasial, dan temporal. Peneliti ini memilih kajian mengenai PRRI-Permesta sebagai batasan tematis supaya penelitian ini berfokus sesuai dengan topik penelitian dan tidak melebar dalam pembahasan. Kemudian cakupan spasial penelitian ini secara khusus dibatasi pada gejolak politis di Sumatra dan Sulawesi yang memiliki kaitan dengan gejolak politis di Indonesia yang terjadi dalam periode ini. Batasan temporal diberi batas dari 1956 hingga 1961: tahun 1956 sebagai permulaan gejolak dengan acara reuni Divisi Banteng, sedangkan tahun 1961 dipilih sebagai batas akhir penelitian mengingat penyelesaian gejolak daerah berangsur selesai pada tahun itu.

## Pembangunan Ekonomi dan Semangat Desentralisasi

Pergolakan daerah pada pertengahan tahun 1950-an, timbul pertama kali di Sumatra. Pada akhir 1956 dan awal 1957, di wilayah ini berturut-turut muncul Dewan Banteng (Sumatra Tengah), Dewan Gajah (Sumatra Utara), dan Dewan Garuda (Sumatra Selatan). Ketiga dewan itu dipimpin oleh para perwira yang pada saat itu memegang komando di wilayah bersangkutan. Ketiga dewan itu lahir sebagai reaksi terhadap situasi bangsa dan negara saat itu (Leirissa 1997, 35). Dalam sebuah artikel berjudul "Sebab Musabab Pembentukan PRRI", R. Z. Leirissa (1999, 146) menjelaskan lebih lanjut bahwa pergolakan itu muncul karena kepentingan dari kalangan masyarakat tertentu yang belum terwujud. Dalam keadaan demikian, masyarakat yang bersangkutan menilai bahwa birokrasi tidak sanggup mengatasi keadaan sehingga inisiatif beralih pada eksponen militer di setiap daerah. Munculnya ketiga dewan di Sumatra, berturut-turut diikuti dengan kemunculan Dewan Lambungmangkurat (Kalimantan Selatan), Komando Perdamaian Nasional atau Kopernas (Jawa Barat), Perjuangan Semesta atau Permesta (Indonesia Timur).

Pada Desember 1956 para perwira tentara di Sumatra yang kebanyakan adalah veteran eks Divisi Banteng dari masa Revolusi mengambil sikap untuk melawan Jakarta dengan dukungan kaum sipil setempat. Pada 20 Desember 1956 komandan resimen di Sumatra Barat mengambil alih pemerintahan sipil. Pada 22 Desember 1956, Kolonel Maludin Simbolon mengumumkan pengambilalihan kekuasaan di Sumatra Utara. Dua hari kemudian panglima Sumatra Selatan memaksa gubernur sipil di sana untuk memenuhi langkah otonomi. Dewan militer di Sumatra dengan cepat mendapat dukungan rakyat karena melakukan pembaruan, perbaikan sekolah serta jalan, dan membasmi korupsi. Jakarta merespon dengan memblokade Medan dan

mengumumkan pengangkatan tentara baru di Sumatra Utara setelah Kolonel Maludin Simbolon dapat digulingkan pada 27 Desember 1956 (Ricklefs 2016, 383–384).

Pada mulanya, pembentukan Dewan Banteng berasal dari reuni Divisi Banteng. Perampangan Divisi Banteng pada Oktober 1949 menjadi satu brigade (Brigade EE Banteng) menjadi salah satu pemicu. Akibat dari penciptaan itu, banyak prajurit yang terpaksa kembali ke kampung halaman mereka. Hal itu membawa kesedihan bagi banyak prajurit yang mempertaruhkan jiwa raga mereka selama Perang Kemerdekaan berlangsung, ada perasaan seolah “habis manis sepagh dibuang”. Keadaan itu menggugah sejumlah perwira bekas Divisi Banteng yang kebetulan tetap berdinasti untuk bertindak. Pada 21 September 1956 diadakan rapat persiapan di Jakarta yang dihadiri 123 orang. Rapat dilanjutkan pada 11 Oktober 1956, panitia reuni di Padang dipimpin Letkol Ahmad Husein, dan dilengkapi oleh kehadiran tokoh, seperti Kolonel Ismail Lengah, Kolonel Dahlan Djambek, dan Kolonel Maludin Simbolon sebagai penasihat (Leirissa 1997, 36–37).

Reuni tersebut berhasil merumuskan gagasan yang dijadikan tujuan perjuangan, mencakup (1) perbaikan yang progresif dan radikal atas masalah pimpinan negara, (2) penyelesaian keributan dalam pimpinan Angkatan Darat, (3) pemberian otonomi seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah Sumatra Tengah, dan (4) penghapusan kecenderungan “sentralisme” dalam birokrasi yang menyebabkan “stagnasi” dan “korupsi” dalam pembangunan. Masalah yang menyangkut langsung bekas pejuang diperjuangkan melalui (1) pembentukan korps veteran; (2) pemberian tunjangan bagi janda dan anak-anak yatim anggota TNI; (3) pemeliharaan makam pahlawan, serta (4) penulisan sejarah perjuangan dan pembentukan museum perjuangan (Leirissa 1997, 38–39).

Melalui poin-poin di atas dapat ditarik benang merah bahwa reuni Divisi Banteng tidak bermaksud untuk berbuat makar. Tujuan utamanya adalah terwujudnya perbaikan, khususnya dalam konstelasi politik nasional yang pada saat itu sedang bergejolak, persoalan Dwi tunggal Soekarno-Hatta, juga situasi di parlemen, dan friksi internal Angkatan Darat. Isu kesejahteraan dan pemerataan juga tidak luput dari pembahasan, permintaan untuk terselenggaranya gagasan otonomi daerah merupakan poin sentral yang diharapkan menjadi solusi untuk permasalahan antara pusat dan daerah.

Sebagaimana dalam pokok-pokok perjuangan Dewan Banteng, disebutkan rumusan politik dan cara mencapainya. Rumusan itu terbagi dalam dua bab: bab pertama menjelaskan wilayah negara, dwitunggal, pimpinan Angkatan Darat, otonomi luas dan perimbangan keuangan, senat, peralatan pemerintah pusat, dan administrasi kenegaraan. Adapun bab kedua, untuk pemerintahan di taraf daerah, dipaparkan realisasi pemerintahan otonom tingkat I, II, dan III dalam daerah Sumatra Tengah. Berikutnya mengenai penyederhanaan, peremajaan, dan efisiensi. Di bidang pertahanan dijelaskan komando utama dan korps Banteng, terakhir dijelaskan ekonomi sosial (Leirissa 1997, 45–52).

Dalam kasus berbeda, Dewan Gajah yang terbentuk di Medan tidak beranggotakan tokoh-tokoh sipil. Keadaan masyarakat dan politik ketika itu tidak memungkinkan sokongan konkret dari pihak sipil. Meskipun sepagh dengan gagasan Dewan Banteng, Dewan Gajah tidak dapat bertahan lama. Struktur masyarakat Sumatra Utara yang berbeda dari masyarakat Sumatra Barat menjadi salah satu penyebab, heterogenitas di Sumatra Utara telah mengakibatkan polarisasi di antara masyarakat yang beragam, baik agama maupun suku bangsa. Berbeda dari Sumatra Barat, ketiadaan dominasi partai tertentu membuat Dewan Gajah gagal mengonsolidasikan kekuatannya.

Keberadaan Dewan Garuda di Sumatra Selatan berawal dari Kongres Adat yang diselenggarakan di Palembang pada 15–16 Oktober 1956. Otonomi daerah menjadi isu utama dalam pembentukannya. Dalam piagam perjuangan rakyat Sumatra Selatan, terdapat empat poin yang meminta pemerintah pusat untuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, dalam hal ini Sumatra Selatan. Salah satu permintaan, dalam poin ketiga, piagam itu menuntut Pemerintah Pusat supaya otonomi daerah yang dimaksudkan itu

meliputi juga ketentuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, termasuk pembagian deviden hasil ekspor dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, provinsi Sumatra Selatan menuntut agar dalam perimbangan keuangan itu, 30 persen untuk pemerintah pusat, dan 70 persen untuk pemerintah daerah (Leirissa 1997, 65).

Perjuangan Semesta (Permesta), menurut H.N. Ventje Sumual, merupakan bagian dari suatu gerakan regional lain, yang sesungguhnya merupakan suatu gerakan mandiri yang mempunyai sifat dan watak khusus, dibandingkan perjuangan di wilayah lain. Walaupun waktu dan tanggal pencanangan dimulai gerakan itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh “pergolakan daerah” yang sebelumnya telah meletus di Sumatra, gejolak di beberapa wilayah di Indonesia Timur sudah mulai mencari bentuk yang memuat aspek sosiologis yang mempunyai persamaan dengan realitas di wilayah lain. Salah satu sifat dasar isu yang dituangkan adalah otonomi daerah, sama dengan yang terjadi di Sumatra (Sumual 1999, 17).

Dalam salah satu poin, Sumual menyatakan bahwa masyarakat Indonesia bagian timur waktu itu masih berada dalam taraf penyesuaian diri dengan suatu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dengan kebijakan yang bersifat integralistik, dengan segala arogansi kekuasaannya yang mengandung unsur ideologis ketat. Teristimewa dalam bidang anggaran belanja, dibahas penempatan personalia dalam bidang pemerintahan sipil dan militer serta penanganan gangguan keamanan. Kesemuanya cenderung mengabaikan dan tidak memperhatikan aspirasi daerah. Oleh sebab itu, Permesta merupakan sebuah gerakan pembangunan daerah, yang dilahirkan melalui suatu pemikiran kritis mengenai hakikat pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh (Sumual 1999, 18–19).

### **Komunisme sebagai Sebuah Ancaman**

Pada bulan Oktober 1956, Presiden Soekarno menawarkan alternatif untuk mengatasi krisis politik yang berkecamuk waktu itu dengan menawarkan sistem pemerintahan lain yang dinamakan “Demokrasi Terpimpin” dengan formula atau konsepsinya sendiri. Untuk itu, Soekarno mengusulkan agar, pertama, dibentuk kabinet baru yang mencakup semua partai terbesar, termasuk PKI, dan kedua, dibentuk satu badan penasihat tertinggi yang para anggotanya terdiri dari semua wakil golongan fungsional di dalam masyarakat. Dalam mewujudkan usulnya itu, dengan kongkret Soekarno kemudian meminta segera dibentuk Kabinet Gotong Royong, dan di sampingnya berdiri Dewan Nasional. Konsepsi itu ternyata bukan hanya tidak berhasil mendapat dukungan mayoritas, tetapi juga tidak berhasil mencapai konsensus. Partai politik menyambutnya dengan suara pro dan kontra (Muhaimin 1982, 93–94). Konsepsi itu ditanggapi keras, termasuk di daerah; isu masuknya PKI dalam kabinet menjadi pembahasan tersendiri.

Sikap antikomunis menjadi salah satu motif kuat bagi gejolak di daerah luar Jawa yang diakui oleh Panitia 7 yang dibentuk pemerintah pusat. Di antara tokoh antikomunis, adalah mantan perdana menteri M. Natsir, mantan Gubernur Bank Indonesia, Mr. Syafrudin Prawiranegara, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Sementara itu, tokoh militer antikomunis disebutkan, antara lain mantan Deputy KASAD, Kolonel Dahlan Djambek dan mantan kepala BISAP, Kolonel Zulkifli Lubis. Dapat diperkirakan bahwa kehadiran mereka secara pribadi di daerah itu mempunyai pengaruh besar pada para pejabat sipil dan militer lokal, khususnya pada Kolonel Ahmad Husein (Bahar 1999, 39–40).

Selain dengan latar belakang keinginan daerah untuk mendapatkan otonominya, semangat antikomunis juga sangat kuat dan menjadi unsur penggalang persatuan. Tidak lama setelah Dewan Banteng terbentuk, masyarakat Sumatra Barat membentuk suatu organisasi yang dinamakan Gerakan Bersama Anti-Komunis (Gebak) yang dipimpin langsung oleh Deputy II KASAD, Kolonel Dahlan Djambek (Leirissa 1997, 57). Semangat antikomunis tampak juga dalam perjuangan Permesta, meskipun tidak disebutkan dalam



Piagam Permesta, tetapi dasar perjuangan gerakan Permesta yang tercantum dalam proklamasi 2 Maret 1957 telah hidup pemikiran bahwa peristiwa itu merupakan senjata antikomunis dan langkah politis yang berpihak pada blok Barat. Selain itu, dalam diskusi penyiapan pembentukan gerakan yang dilakukan korps perwira TT (Tentara dan Teritorium) VII, watak antikomunis, sesungguhnya mencuat di permukaan (Sumual 1999, 20–21).

Pihak lain, dalam kaitan dengan perang dingin, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memiliki kepentingan atas Indonesia. Letak strategis Indonesia di Asia Tenggara dikhawatirkan akan mengganggu penetrasi ekonomi bebas AS di wilayah itu apabila Indonesia jatuh ke tangan komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah AS, termasuk menjalin komunikasi dengan para perwira pembangkang dan suplai senjata dan pelatihan militer untuk milisi PRRI-Permesta. Dasar kepentingan yang sama, yaitu antikomunisme membuat kerja sama antara para perwira pembangkang dan pemerintah AS berjalan meskipun dalam beberapa kesempatan pemerintah AS membantah terlibat secara langsung. Sebagaimana pada tahun 1950-an, AS memandang Indonesia melalui analogi dengan Cina. Pemerintah AS tampaknya khawatir bahwa keberhasilan kaum komunis di Cina pada 1949 (berdirinya RRC) terulang di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Indonesia menolak kerja sama dengan AS dalam rangka teori domino (pembendungan komunisme).

Keterlibatan AS dalam memberikan suplai senjata itu diakui salah satu tokoh Permesta, Lengkong Worang. Menurutnya, ketika perang Permesta dimulai, ada ribuan pucuk senjata api dan senjata mesin lengkap dengan amunisi yang dimiliki Permesta. Belum lagi ditambah dengan sejumlah mortir 81 mm, truk pengangkut, mobil jip, pesawat tempur yang tersedia. Kemudian, di Lapangan Udara Mapanget (saat ini berubah menjadi Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado) sering terparkir sejumlah pesawat tempur jenis B-26 dan diawaki sendiri oleh pilot AS. Melalui penuturannya, ketika Lengkong Worang berkeliling dengan Landrovernya, terutama ketika menempatkan senjata bantuan 12,7 dan mortir 81 mm di daerah sekitar Lapangan Terbang Mapanget, terlihat sejumlah Perwira AS sedang beristirahat sambil tidur-tiduran di bawah pohon (Kaunang 2015, 112–113).

Namun, kekuatan udara dan bantuan asing itu hanya berlangsung beberapa bulan saja. Pada bulan Mei 1958, seluruh peralatan perang itu ditarik kembali dan dukungan AS dihentikan. Tindakan itu menimbulkan kekecewaan yang sangat besar pada pihak Permesta. Maka, sejak serangan pusat, pasukan PRRI/Permesta di Sumatra Barat dan Minahasa bertempur sendiri tanpa personel asing (Leirissa 1997, 194–195). Perubahan itu berkaitan dengan kebijakan AS. Pada Maret 1958, AS mengganti dubesnya di Indonesia dengan Howard P. Jones. Setiba di Indonesia ia menghubungi tokoh seperti Soekarno, Hatta, Djuanda, Nasution dan mengambil kesimpulan bahwa di Jakarta masih ada tokoh antikomunis yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan kepada pemerintahnya untuk membantu mereka, terutama dalam bentuk senjata dan bantuan ekonomi. Pada mulanya AS ragu-ragu dan mengajukan syarat agar Jakarta menempuh cara penyelesaian politis, yaitu berunding dengan PRRI/Permesta. Namun, kemudian terjadi peristiwa Allan Laurence Pope tertembak, 18 Mei 1958 (baru diumumkan 27 Mei).

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepala Staf Angkatan Udara 17 Februari 1959, terdapat dua orang yang ditahan dengan tuduhan melakukan tindakan subversif, yaitu Allan Laurence Pope, berkebangsaan AS dan seorang WNI, Jan Harry Rantung. Mereka berdua ditahan sejak 18 Mei 1958 (ANRI). Penangkapan itu menghebohkan karena Pope berkaitan dengan CIA. Menghadapi situasi itu, AS terpaksa mengikuti saran Jones dan pada 22 Mei disetujui bantuan senjata dan ekonomi untuk RI. Perjanjian ekonomi baru dibuat pada 13 Agustus 1958 (Jones 1980, 116 dan 151 dalam Leirissa 1997, 195).

Sebelum Allan Laurence Pope tertembak, Perdana Menteri Djuanda telah membuat pernyataan pada 30 April 1958 yang mensinyalir keterlibatan asing dalam aktivitas PRRI. Hal itu berkaitan dengan serangan

udara yang dilakukan kaum pemberontak di beberapa tempat tidak mungkin dilakukan sendiri oleh kaum pemberontak mengingat mereka hanya mempunyai dua penerbang bangsa Indonesia. Selain itu, di Manado dan sekitarnya sudah lama tidak ada bensin untuk kapal terbang karena instalasi bensin sudah dirusak. Akibatnya, diambil kesimpulan bahwa penerbang yang ditugasi oleh kaum pemberontak itu berbangsa AS dan Taiwan, yang datang ke Indonesia melalui jalur ilegal. Djuanda dalam pernyataannya mengingatkan bahwa, apabila hal itu dibiarkan, akan memengaruhi hubungan tidak baik antara Indonesia dan AS (ANRI).

Melalui buku *50 Tahun Amerika Serikat-Indonesia*, Paul F. Gardner (1999) mengungkapkan bahwa penaklukan dataran Tiongkok oleh kaum komunis menghantui para pembuat kebijakan Amerika sepanjang tahun 1950-an. Tiongkok ke bawah kekuasaan komunis dianggap sebagai kekalahan Blok Barat. Maka, di kalangan pemerintahan Presiden Eisenhower muncul pendapat bahwa kekalahan ini diakibatkan kesalahan dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah Presiden Truman sebelumnya, yang lunak terhadap komunisme, dan mereka bertekad tidak mengulangi kesalahan itu di negara lain (Gardner 1999, 265).

Maka, dalam bulan Agustus 1957, Kementerian Luar Negeri mendapat tugas dari *National Security Council* (Dewan Keamanan Nasional) untuk membentuk panitia rahasia *Interdepartmental Ad Hoc Committee on Indonesia*, yang beranggotakan lima orang yang menyusun suatu rahasia untuk mendesak Indonesia mempertimbangkan sungguh-sungguh bahaya komunisme. Rencana rahasia itu mulai dilaksanakan sejak awal 1958 melalui serangkaian operasi terselubung (*covert operations*) oleh satuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS yang berpangkalan di pasifik (Leirissa 1999, 57). Operasi CIA di Indonesia merupakan kegiatan tertutup tingkat tinggi yang melibatkan pejabat penting pemerintah AS pada masa itu: Presiden Dwight Eisenhower, Menlu John Foster Dulles, kemudian Allan Dulles, Direktur CIA, dan melibatkan banyak agen CIA lain. Menurut Audrey R. Kahin dan George Mc Tuman Kahin (1997, 113–122) inisiatif membendung komunisme itu diambil oleh Menlu John Foster Dulles, tetapi dilontarkan oleh *National Security Council* yang dipimpin Presiden Eisenhower, untuk membentuk suatu panitia khusus untuk merancang kegiatan yang dirahasiakan.

### Perjumpaan Antara Dua Kepentingan Berbeda

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), *konvergensi* adalah keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat. Maka, dalam kaitan dengan makalah ini, *konvergensi* atau titik pertemuan antara kepentingan yang muncul dalam pergolakan daerah di Sumatra dan Sulawesi yang melibatkan PRRI-Permesta menjadi salah satu fokus pembahasan. Pihak pertama adalah daerah-daerah yang menginginkan pembangunan ekonomi yang lebih baik melalui otonomi daerah, pihak kedua adalah AS yang memiliki kepentingan atas Indonesia yang jatuh ke tangan komunis. Dua kepentingan ini bertemu di satu titik, yaitu antikomunisme. Baik penggagas PRRI-Permesta maupun pemerintah AS merupakan dua pihak yang sama-sama antikomunis.

Apabila pergolakan di daerah pada umumnya berkenaan dengan masalah lokal dalam negeri, PRRI-Permesta, selain masalah politis dalam negeri juga mempunyai dimensi internasional akibat perang dingin antara Blok Barat (AS dan sekutunya) dan Blok Timur (Uni Soviet dan Sekutu). CIA, intelijen pemerintah AS, ditengarai terlibat dalam operasi itu. Menurut R.Z. Leirissa (1999, 149), pembentukan PRRI adalah murni inisiatif para pemimpin di daerah bergolak berdasarkan pertimbangan strategis mereka sendiri. Tampaknya, paling kurang sejak pertemuan Sungai Dareh (Desember 1957), para pemimpin militer di daerah bergolak itu yakin bahwa dengan bekerja sama secara intensif dengan AS mereka dapat bertahan dari ancaman dari pusat, sementara tokoh politis seperti Hatta diharapkan menyelesaikan masalah secara damai di Jakarta.

Sikap antikomunis yang menjadi salah satu latar belakang pergolakan daerah di Sumatra dan Sulawesi, dan sikap sama yang ditujukan oleh pemerintah AS kepada komunisme menjadi titik perjumpaan

pertama. Kesamaan visi itu ditunjang dengan hubungan antara para perwira pembangkang dan AS. PRRI-Permesta yang pada awalnya dibentuk untuk menyikapi pemerataan dan kesejahteraan ekonomi daerah, dengan gagasan otonomi menjadi pintu masuk bagi AS untuk mengondisikan kepentingannya pada titik perjumpaan kedua.

Selain itu, menurut Barbara Sillars Harvey (1999, 13) dalam urusan ekonomi, AS memiliki kepentingan atas investasi mereka. AS melakukan investasi di bidang perkebunan dan minyak di Sumatra, dan sangat jelas bahwa keberadaan investasi AS bergantung pada pembuat kebijakan. Meskipun demikian, menurutnya kepentingan itu tidak sepenting kebijakan antikomunis AS meskipun ada kekhawatiran akan perlindungan investasinya.

### Catatan Penutup

Sebelum pertemuan Sungai Dareh dilangsungkan, Ahmad Husein dan Panglima Sumatra Selatan Kolonel Barlian masih berharap mencapai kompromi di antara para kolonel di daerah bergolak dan KSAD Nasution. Maka direncanakan pertemuan di Pulau Bangka pada akhir Desember 1957 atau awal Januari 1958, tetapi pertemuan itu batal karena ada perbedaan pendapat di antara mereka. Nasution bersikeras agar hanya panglima yang memiliki komando hadir dalam pertemuan itu, berarti Maludin Simbolon dan Zulkifli Lubis tidak turut serta dalam pertemuan itu. Sebaliknya, Ahmad Husein berpendapat, jika mau berunding, Maludin Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek harus diikutsertakan. Alasannya perundingan bersangkut-paut dengan mereka (Zed dan Chaniago 2001, 234).

Setelah pertemuan Bangka batal, Barlian mengusulkan pertemuan di Sungai Dareh, wilayah paling selatan dari Sumatra Barat, pada 9–10 Januari. Pada awalnya, pertemuan hanya akan dihadiri pimpinan militer terkait, tetapi meluas setelah dihadiri politikus sipil dari Jakarta. Selain Husein, Sumual, juga Simbolon, Lubis dan Mayor Nawawi sebagai utusan Barlian yang batal hadir, serta Mayor Alamsyah. Mantan intelijen Sumatra Selatan itu, tanpa diketahui anggota lain bahwa mempunyai hubungan dekat dengan Nasution, melaporkan pertemuan itu (Leirissa 1997, 183). Di Sungai Dareh, juga terdapat pemimpin sipil yang hadir, seperti Soemitro Djojohadikusumo, Burhanuddin Harahap, Mohammad Natsir, serta Sjafruddin Prawiranegara.

Pada akhir pertemuan Sungai Dareh, Ahmad Husein dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Perjuangan dengan memasukkan tokoh politis di dalamnya di samping sejumlah perwira AD. Setelah pertemuan Sungai Dareh itu, Ahmad Husein, Sumual, dan Soemitro ditugaskan pembelian senjata ke luar negeri. Selama awal 1958, Dewan Perjuangan masih berusaha mendekati Jakarta untuk merumuskan gagasan *reshuffle* kabinet Djuanda. Pada perkembangan berikutnya, Dewan Perjuangan terus melakukan sidang dan diskusi di Padang untuk menentukan langkah selanjutnya. Akhirnya diputuskan satu langkah drastis untuk mengultimatum Jakarta, yaitu membentuk pemerintah tandingan sebagai upaya menekan Jakarta (Zed dan Chaniago 2001, 236).

Sebagai KSAD, Nasution telah berusaha membendung pemberontakan ini. Pada 23 Januari 1958, Nasution dengan cepat menghubungi para komandan militer di Tapanuli, Aceh, dan Riau. Ia berhasil memperoleh kesetiaan atau pernyataan sikap netral mereka. Dalam rangka upaya yang sama Nasution mengunjungi Sulawesi Utara walaupun tidak mencapai hasil yang diinginkan. Anehnya ia tidak melakukan tindakan yang sama di Sumatra Barat. Upaya mencegah justru dilakukan oleh Mayor Jenderal TB Simatupang, yang secara pribadi mengadakan kontak dengan mantan panglima Komando Daerah Militer Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon yang bermukim di Padang setelah gagal mengambil alih pemerintah di Sumatra Utara (Simatupang 1991, 181–182).



Menurut Letkol Rudy Pirngadie, dalam catatannya di buku *Peristiwa PRRI, Ditinjau dari Sudut Sejarah TNI*, setelah proklamasi PRRI di Padang pada 15 Februari 1958, mereka menghitung bahwa paling tinggi akan ada perang dingin tanpa letusan, dan mereka memperkirakan bahwa dalam perang dingin itu mereka keluar sebagai pemenang. Maka, dapat dimengerti mengapa mereka dalam proklamasi pertama tidak menyebutkan soal komunis dan antikomunis sebagai propaganda mereka. Namun, setelah sikap tegas diambil TNI, mereka baru menyadari bahwa pemerintah tidak mengadakan perang dingin tetapi perang panas atau *shooting war*. Setelah mengetahui bahwa sebagian pihak TNI tidak ada yang memihak kepada mereka seperti yang diharapkan semula, mulailah mereka memobilisasi anak sekolah, mengajukan tema antikomunis untuk mendapat simpati negara Barat, dan kalang kabut: mereka dengan terang-terangan mengundang intervensi Barat (Pirngadie 1958, 13–14). Aksi pemberontakan yang terjadi, menurut Ichlasul Amal, dapat dikualifikasi sebagai gerakan *top-heavy* sehingga lebih siap untuk menghadapi *political showdown*. Kenyataan menunjukkan bahwa PRRI hanya mampu menunjukkan sedikit perlawanan militer yang efektif ketika pemerintah pusat memutuskan menggunakan aksi militer untuk menyelesaikan masalah PRRI (Amal 1993, 142).

Pergolakan di daerah, yang semula merupakan hasrat murni rakyat daerah dapat dibenarkan oleh pemerintah dan telah dicarikan solusinya dengan jalan Musyawarah Pembangunan antara daerah dan pusat telah disalahgunakan oleh petualang politis dan militer dalam PRRI-Permesta. Menyangkut hal itu, pemerintah Kabinet Djuanda telah menyatakan pendiriannya bahwa pergolakan di daerah mengandung unsur baik, hasrat murni dari rakyat daerah untuk mendapatkan otonomi yang luas, perimbangan keuangan yang sehat antara pusat dan daerah, alokasi dividen kepada daerah, dekosentrasi perdagangan luar negeri, dan lainnya. Akan tetapi cita-cita yang baik rakyat daerah itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menjalankan politik obstruksi di luar parlemen terhadap Presiden dan Pemerintah, dan kemudian pergolakan di daerah itu diberi sifat antikomunis (Departemen Penerangan Indonesia 1959: 4–5).

Pada 1960, dirintis upaya penyelesaian perang gerilya. Perundingan dilancarkan secara terpisah antara pemimpin pasukan PRRI-Permesta dan pihak ABRI. Pada April 1961, sebagian pasukan Permesta menghentikan perlawanan dan turun ke Manado. Pada Agustus 1961, pasukan PRRI dari Sumatra Utara melapor secara resmi kepada Jenderal Gatot Soebroto di Balige. Pasukan lain dari Sumatra Barat pun menyusul melakukan hal yang sama. Konflik senjata itu berakhir secara definitif pada tahun itu juga setelah H.N. Sumual, pucuk pimpinan pasukan PRRI-Permesta, secara tertulis menyatakan “menyerah, ulangi, menyerah tanpa syarat”. Dalam pernyataan itu, Sumual dengan tegas menyatakan bahwa ia memikul di atas pundaknya seluruh tanggung jawab atas segenap jajaran pasukan dan sipil PRRI-Permesta, baik dalam maupun luar negeri (Harvey 1983, 163–199). Amnesti diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang terlibat dalam pergolakan itu melalui Keppres No. 332 tahun 1961, tanggal 22 Juni 1961. Keppres itu mengatur amnesti dan abolisi kepada semua pihak yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Melalui tulisannya yang berjudul *PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterpretasi* (1999), Mestika Zed berpandangan bahwa PRRI sesungguhnya lebih dari sekadar gerakan kaum regionalis, bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan nasional yang melintasi batas-batas kedaerahan dan latar belakang suku serta agama mereka. Gerakan itu tetap mengakui konstitusi dan menjunjung negara kesatuan dan tidak satu pun pernyataan dan maksud dari gerakan PRRI untuk mengadakan pemisahan dari Republik Indonesia yang dilahirkan lewat Proklamasi 17 Agustus 1945, kecuali dari rezim Soekarno (Zed 1999, 122).

Sementara itu, Leirissa dalam bukunya, *PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (1997), mengungkapkan bahwa pergolakan yang terjadi di Indonesia, terutama yang melibatkan PRRI-Permesta tidak lepas dari beberapa sebab yang mendahului. Antara lain, gagalnya sistem politis,

gagalnya pembangunan ekonomi, kemudian ancaman komunisme di Indonesia dan kesenjangan dalam tubuh Angkatan Darat. Berbagai sebab itu melatarbelakangi kegiatan Dewan Banteng hingga Permesta yang menginginkan pembaharuan di berbagai sektor, terutama otonomi daerah yang nyata.

Melalui beragam gambaran tersebut di atas, penulis itu memberikan catatan bahwa pergolakan yang melibatkan PRRI-Permesta pada awalnya merupakan sikap yang diambil oleh para perwira militer daerah setelah melihat berbagai ketidakberesan pemerintah pusat dalam mengurus pemerintahan. Sikap itu dipicu oleh keputusan pemerintah yang melakukan perampangan di tubuh TNI sehingga sebagian pasukan harus gantung senjata, dan menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang selama masa Revolusi turut berjuang mempertahankan Republik. Ditambah lagi, melihat kisruh politis di pusat yang tidak memberi dampak positif ke daerah, para perwira politikus di daerah bergerak untuk melakukan pembangunan daerah. Itu jelas tampak dalam tuntutan mereka kepada pemerintah pusat mengenai pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan transparan.

Keberadaan politikus sipil dalam pergolakan tersebut, seperti Soemitro, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, terutama tokoh PSI dan Masjumi, terhitung sejak pertemuan Sungai Dareh, memberi sokongan para perwira militer yang berjuang melawan pemerintah. Sebagai oposisi, dan sebagai partai yang memiliki mayoritas suara di luar Jawa, khususnya Sumatra dan Sulawesi, keberadaan mereka semakin meneguhkan sikap dalam menekan Pemerintah Pusat, hingga ultimatum dikeluarkan. Maka, lebih tepat dikatakan bahwa pergolakan itu terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, bukan antara Jawa dan Luar Jawa.

Mengenai komunisme, pengaruh PKI yang semakin kuat pada Soekarno, termasuk gagasan dan konsepsi Soekarno melalui demokrasi terpimpin untuk memasukkan PKI ke dalam kabinet, menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Pengaruh PKI yang semakin tampak nyata di dalam hasil Pemilu 1955 membuat banyak pihak khawatir bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis pada masa mendatang. Pihak itu di antaranya Angkatan Darat dan AS. Timbulnya friksi antikomunis di Angkatan Darat menjadi salah satu pemicu pergolakan di daerah, selain sebab utama mengenai pembangunan di daerah. Kepentingan AS atas Indonesia jelas tampak dalam operasi yang mereka lakukan untuk membendung komunisme di Asia Tenggara pada dekade 1950-an. Sikap antikomunis itu semakin kuat tatkala dukungan politikus sipil dari pihak oposisi datang untuk melakukan tindakan terhadap pemerintahan Soekarno.

Pertemuan dua kepentingan berbeda, kegelisahan para perwira di daerah mengenai situasi nasional, dan pembangunan daerah yang tidak berjalan dengan baik serta sikap antikomunis mereka, semakin menguat ketika bantuan persenjataan dari luar negeri, dalam hal ini AS menyokong pemberontakan terhadap pemerintah pusat dengan dalih kesamaan visi antikomunis. Maka, dapat ditarik benang merah bahwa sikap antikomunis yang ditunjukkan oleh para perwira pembangkang dan politikus oposisi semakin memuncak ketika mereka mendapat tekanan dari pusat, mereka tidak memiliki banyak pilihan kecuali melakukan perlawanan.

## Daftar Referensi

- Amal, Ichlasul. 1993. Dimensi Politik Hubungan Pusat Daerah Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan dalam Colin MacAndrews dan Ichlasul Amal (ed). *Hubungan Pusat Daerah dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ANRI. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959, jilid II. Berkas mengenai perkara penerbang AL Pope, 3 Juni 1958–23 Februari 1959. No. Arsip: 586.
- \_\_\_\_\_. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950–1959, jilid I. Statemen PM Djuanda mengenai serangan udara yang dilakukan oleh kaum pemberontak, 30 April 1958. No. Arsip: 1217.
- Bahar, Saafroedin. 1999. PRRI-Permesta: Sebuah Keterkaitan antara Masalah Integrasi Nasional dan Perang Dingin. *Jurnal Studi Amerika IV*, (Januari Juli): 39–40.
- Departemen Penerangan Indonesia. 1959. *Mendjelang Dua Tahun Kabinet Karya, 9 April 1957 – 9 April 1959*. Djakarta: Kementerian Penerangan.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (Seri Laporan Sementara)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gardner, Paul F. 1999. *50 Tahun Amerika Serikat-Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Harvey, Barbara Sillars. 1983. *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti Pers.
- \_\_\_\_\_. 1999. PRRI/Permesta at “50 Years Indonesia-America Relation”. *Jurnal Studi Amerika IV*, (Januari Juli): 13.
- Jones, Howard P. 1980. *Indonesia: The Possible Dream*. Singapura: Gunung Agung.
- Kahin, Audrey R. dan George McTurnan Kahin. 1997. *Subversi Sebagai Kegiatan Politik Luar Negeri. (Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia)*. Jakarta: Grafitipress.
- Kahin, George McTurnan. 1959. *Indonesia*. Dalam *Major Government of Asia*, ed. George McTurnan Kahin, 559–572. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Kaunang, Ivan R.B. 2015. *Permesta, Manusia Dalam Perang: Riwayat Perjuangan Lengkong Worang, Kapten Permesta, Letkol (Purn) TNIAD*. Minahasa: Graha Cendikia bekerja sama dengan Institut Kajian Budaya Minahasa.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Leirissa, R. Z. 1997. *PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- \_\_\_\_\_. 1999. PRRI-Permesta: Tinjauan Historiografis. *Jurnal Studi Amerika IV*, (Januari Juli): 57.
- \_\_\_\_\_. 1999. Sebab Musabab Pembentukan PRRI. *Jurnal Studi Amerika IV*, (Januari Juli): 146, 149.
- Muhaimin, Yahya A. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945–1966*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Pirngadie, Rudy. 1958. *Peristiwa PRRI Ditinjau Dari Sudut Sejarah TNI*. Jakarta: NV Endang.
- Ricklefs, M. C. 2016. *Sejarah Indonesia Modern*, Cetakan ke-11. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Simatupang, T.B. 1991. *Membuktikan Kebenaran Suatu Mitos, Menelusuri Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas Bagi Masa Depan Masyarakat, Bangsa, dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Southgate, Beverley. 1996. *History What dan Why? Ancient, Modern, and Postmodern Perspective*. London: Routledge.
- Sumual, H.N. 1999. Ventje. Permesta, Gerakan yang Dilahirkan Pemikiran Kritis Menyatu dengan Praxis Kehidupan Sosial Politik. *Jurnal Studi Amerika IV*, (Januari Juli): 18–19.

- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 (Menuju Dwi Fungsi ABRI)*. Pen. Hasan Basari. Cetakan ke-1. Jakarta: LP3ES.
- Zed, Mestika dan Hasril Chaniago. 2001. *Ahmad Husein, Perlawanan Seorang Pejuang (Biografi Kolonel Ahmad Husein)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_. 1999. PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterpretasi. *Jurnal Studi Amerika IV*, (Januari Juli): 122.